

Penerapan E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Studi Kasus: Pemerintah Kota Surakarta

Natta Sanjaya¹, Hilandri Dewi F.S², Selvi Septiana Putri³, Sendy Himalia Putri⁴, Abhista Nasya D⁵, Mutiara Rini⁶

¹⁻⁶Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar

¹nattasanjaya@untidar.ac.id, ²hilandridw@gmail.com, ³selviseptiana82@gmail.com,
⁴sendyhim10@gmail.com, ⁵abhistanasya1@gmail.com, ⁶mutiararini563@gmail.com

*corresponding author

Article Info

Article History

Received:

4 June 2025

Accepted:

18 June 2025

Published:

20 June 2025

Kata Kunci

Transparansi
anggaran Tata kelola
keuangan.

Keywords

e-Budgeting
Budget transparency
Financial
governance

Abstrak

dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan studi kasus di Pemerintah Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan menelaah berbagai sumber pustaka terkait implementasi e-Budgeting dalam tata kelola keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Budgeting di Kota Surakarta berhasil meningkatkan efisiensi proses administrasi, memperkuat transparansi anggaran, dan mendorong partisipasi publik melalui akses informasi yang terbuka. Keberhasilan ini didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta komitmen manajerial yang kuat. Namun, tantangan seperti risiko keamanan siber, ancaman virus, dan rendahnya literasi digital masyarakat masih perlu diatasi. Kesimpulannya, e-Budgeting merupakan inovasi penting dalam mewujudkan good governance dan layak diadopsi oleh pemerintah daerah lain sebagai upaya reformasi pengelolaan keuangan yang modern dan akuntabel.

Abstract This study aims to examine the implementation of the e-Budgeting system in supporting transparency and accountability in regional financial management, using the Government of Surakarta City as a case study. The research method employed is a literature review by analyzing various relevant academic sources on the implementation of e-Budgeting in public financial governance. The findings indicate that the application of e-Budgeting in Surakarta has improved administrative efficiency, strengthened budget transparency, and encouraged public participation through open access to financial information. This success is supported by competent human resources, adequate technological infrastructure, and strong managerial commitment. However, challenges such as cybersecurity threats, potential system viruses, and low digital literacy among the public remain significant issues. In conclusion, e-Budgeting is a vital innovation for realizing good governance and should be adopted by other regional governments as part of a modern and accountable financial reform effort.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di tengah perkembangan teknologi saat ini, pemanfaatan sistem digital menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik. Salah satu bentuk inovasi digital yang dikembangkan adalah sistem e-Budgeting, yaitu platform berbasis web yang digunakan untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran secara lebih sistematis dan terbuka. Melalui sistem ini, informasi tentang penggunaan anggaran dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat, sehingga mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi dalam informasi anggaran menjadi hal yang sangat penting. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap data keuangan pemerintah, mereka dapat turut serta mengawasi proses alokasi dan penggunaan dana publik. Keterlibatan ini secara tidak langsung berperan dalam menekan risiko penyalahgunaan anggaran maupun praktik korupsi. Pemerintah pusat melalui arahan Presiden Joko Widodo, telah mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan sistem e-Budgeting sebagai bagian dari upaya membangun sistem keuangan yang terbuka, akurat, dan efisien. Dengan sistem ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diharapkan dapat meningkat karena proses penganggaran menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara regulatif, penerapan e-Budgeting termasuk dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Sistem ini dirancang untuk memperbaiki layanan publik melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan pengurangan potensi penyimpangan anggaran. Salah satu contoh penerapan yang cukup berhasil dapat ditemukan di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta telah menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang transparan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejak mulai mengimplementasikan e-Budgeting pada tahun 2017, Kota Surakarta telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak dua belas kali secara berturut-turut sebuah capaian yang

mencerminkan tata kelola keuangan yang baik dan minim penyimpangan. Keberadaan sistem e-Budgeting telah membawa dampak positif, khususnya dalam meningkatkan akses informasi keuangan bagi masyarakat serta memperbaiki manajemen dokumen anggaran. Sistem ini tidak hanya memudahkan pelacakan penggunaan dana publik secara daring, tetapi juga mendukung proses dokumentasi dan evaluasi yang lebih efisien. Hal ini menjadi bukti bahwa digitalisasi dalam tata kelola anggaran mampu meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Meski demikian, pelaksanaan e-Budgeting tidak lepas dari sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, terutama yang masih memiliki akses internet dan perangkat yang terbatas. Selain itu, aspek keamanan data juga menjadi hal yang penting untuk terus diperhatikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah perlu melakukan peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur yang terlibat agar sistem ini dapat dioperasikan secara optimal. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran melalui forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga perlu terus diperkuat. Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pemerintah dapat menyusun anggaran yang lebih relevan dengan kebutuhan dan harapan publik.

Dengan latar belakang tersebut, menarik untuk ditelaah lebih dalam bagaimana penerapan e-Budgeting di Kota Surakarta mampu mendorong terciptanya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Kota Surakarta dipilih sebagai studi kasus karena dianggap berhasil mengintegrasikan sistem digital dalam pengelolaan keuangannya, yang ditandai dengan capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten. Penelitian ini tidak hanya akan menggambarkan proses teknis implementasi e-Budgeting, tetapi juga mengkaji secara mendalam dalam meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah potensi penyimpangan anggaran. Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis e-Budgeting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, sekaligus memberikan masukan bagi daerah lain dalam pengembangan sistem keuangan berbasis digital. Penjabaran lebih lanjut mengenai aspek-aspek tersebut akan dibahas secara mendalam.

Tinjauan Pustaka

E-budgeting atau electronic budgeting adalah sebuah sistem pengelolaan anggaran yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendigitalisasi seluruh proses perencanaan, pengajuan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran pemerintah. Konsep utama dari e-budgeting adalah menciptakan sistem penganggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel, di mana setiap tahapan anggaran tercatat secara elektronik dan dapat dilacak (audit trail) oleh berbagai pemangku kepentingan. Sistem ini dikembangkan untuk menggantikan sistem manual yang selama ini cenderung lambat, tertutup, dan rentan penyimpangan (Rohma, 2023). Pada praktiknya, e-budgeting mengintegrasikan proses dari berbagai unit kerja dalam satu sistem terpadu. Usulan kegiatan dari masing-masing unit dimasukkan ke dalam sistem secara daring, lalu dilakukan validasi secara otomatis oleh perencana, sehingga mempercepat alur birokrasi dan mengurangi potensi manipulasi data. Keunggulan e-budgeting terletak pada kemampuannya untuk menyimpan seluruh riwayat keputusan anggaran secara digital, yang memudahkan proses evaluasi dan audit, baik oleh internal pemerintah maupun oleh masyarakat umum. Gunawan (2016), dalam studi kasus di Kota Surabaya, membuktikan bahwa penerapan e-budgeting dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain mempercepat proses administratif, e-budgeting juga berperan sebagai alat pengendali dan pemantau kinerja birokrasi. Pimpinan instansi dapat memantau kesesuaian antara rencana anggaran dan pelaksanaan program secara langsung, bahkan dalam waktu nyata (real-time). Sistem ini membantu mendeteksi penyimpangan lebih dini, serta memberikan data yang akurat untuk perencanaan tahun berikutnya. Meilani dkk. (2024) menjelaskan bahwa e-budgeting memudahkan pengambilan keputusan berbasis data, mengurangi tumpang tindih program, dan meningkatkan integrasi antara rencana pembangunan dan penganggaran.

Lebih jauh, e-budgeting juga mendorong partisipasi publik dan pengawasan eksternal. Sebagian besar sistem e-budgeting yang diterapkan di daerah-daerah kini telah membuka akses informasi kepada masyarakat melalui laman resmi pemerintah. Informasi yang dulunya sulit diakses kini tersedia dalam bentuk ringkasan anggaran, progres realisasi,

hingga rincian belanja. Hal ini mendorong prinsip good government yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran. Nasution dan Ramadhan (2019) menyebut bahwa keterbukaan informasi publik melalui e-budgeting terbukti mendorong perbaikan transparansi fiskal di berbagai pemerintah daerah.

Namun demikian, efektivitas e-budgeting sangat bergantung pada faktor pendukung lain seperti kapasitas sumber daya manusia (SDM), kesiapan infrastruktur teknologi, serta komitmen kelembagaan. Masih banyak daerah yang menghadapi hambatan teknis dan budaya kerja birokrasi yang belum siap dengan digitalisasi penuh. Dalam hal ini, Meilani dkk. (2024) menekankan pentingnya pelatihan aparatur, regulasi yang jelas, serta perubahan pola pikir agar e-budgeting tidak hanya menjadi proyek teknologi, tetapi juga bagian dari reformasi sistemik dalam tata kelola keuangan publik.

Secara normatif, penerapan e-budgeting juga telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi tersebut mewajibkan pengelolaan anggaran yang transparan dan berbasis sistem informasi. Oleh karena itu, dalam tataran konseptual, e-budgeting bukan hanya alat bantu teknis, tetapi juga representasi dari komitmen negara terhadap good governance, penguatan pengawasan publik, dan pencapaian efisiensi fiskal.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (library research), yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik yang diteliti. Metode ini memanfaatkan data sekunder yang telah tersedia dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi, dan berbagai literatur akademik lainnya untuk membangun pemahaman teoritis dan konseptual terhadap isu yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali berbagai pandangan, konsep, dan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Studi literatur dilakukan secara sistematis dengan menentukan fokus kajian, mencari referensi yang kredibel, melakukan analisis isi secara mendalam, dan menyusun sintesis terhadap

berbagai informasi yang ditemukan. Seluruh sumber yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari referensi yang sah dan akademik, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mendukung kualitas kajian secara keseluruhan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep e-budgeting

E-budgeting atau electronic budgeting adalah sebuah sistem pengelolaan anggaran yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendigitalisasi seluruh proses perencanaan, pengajuan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran pemerintah. Konsep utama dari e-budgeting adalah menciptakan sistem penganggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel, di mana setiap tahapan anggaran tercatat secara elektronik dan dapat dilacak (audit trail) oleh berbagai pemangku kepentingan. Sistem ini dikembangkan untuk menggantikan sistem manual yang selama ini cenderung lambat, tertutup, dan rentan penyimpangan (Rohma, 2023).

Pada praktiknya, e-budgeting mengintegrasikan proses dari berbagai unit kerja dalam satu sistem terpadu. Usulan kegiatan dari masing-masing unit dimasukkan ke dalam sistem secara daring, lalu dilakukan validasi secara otomatis oleh perencana, sehingga mempercepat alur birokrasi dan mengurangi potensi manipulasi data. Keunggulan e-budgeting terletak pada kemampuannya untuk menyimpan seluruh riwayat keputusan anggaran secara digital, yang memudahkan proses evaluasi dan audit, baik oleh internal pemerintah maupun oleh masyarakat umum. Gunawan (2016), dalam studi kasus di Kota Surabaya, membuktikan bahwa penerapan e-budgeting dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain mempercepat proses administratif, e-budgeting juga berperan sebagai alat pengendali dan pemantau kinerja birokrasi. Pimpinan instansi dapat memantau kesesuaian antara rencana anggaran dan pelaksanaan program secara langsung, bahkan dalam waktu nyata (real-time). Sistem ini membantu mendeteksi penyimpangan lebih dini, serta memberikan data yang akurat untuk perencanaan tahun berikutnya. Meilani dkk. (2024) menjelaskan bahwa e-budgeting memudahkan pengambilan keputusan berbasis data,

mengurangi tumpang tindih program, dan meningkatkan integrasi antara rencana pembangunan dan penganggaran.

Lebih jauh, e-budgeting juga mendorong partisipasi publik dan pengawasan eksternal. Sebagian besar sistem e-budgeting yang diterapkan di daerah-daerah kini telah membuka akses informasi kepada masyarakat melalui laman resmi pemerintah. Informasi yang dulunya sulit diakses kini tersedia dalam bentuk ringkasan anggaran, progres realisasi, hingga rincian belanja. Hal ini mendorong prinsip good government yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran. Nasution dan Ramadhan (2019) menyebut bahwa keterbukaan informasi publik melalui e-budgeting terbukti mendorong perbaikan transparansi fiskal di berbagai pemerintah daerah.

Namun demikian, efektivitas e-budgeting sangat bergantung pada faktor pendukung lain seperti kapasitas sumber daya manusia (SDM), kesiapan infrastruktur teknologi, serta komitmen kelembagaan. Masih banyak daerah yang menghadapi hambatan teknis dan budaya kerja birokrasi yang belum siap dengan digitalisasi penuh. Dalam hal ini, Meilani dkk. (2024) menekankan pentingnya pelatihan aparatur, regulasi yang jelas, serta perubahan pola pikir agar e-budgeting tidak hanya menjadi proyek teknologi, tetapi juga bagian dari reformasi sistemik dalam tata kelola keuangan publik.

Secara normatif, penerapan e-budgeting juga telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi tersebut mewajibkan pengelolaan anggaran yang transparan dan berbasis sistem informasi. Oleh karena itu, dalam tataran konseptual, e-budgeting bukan hanya alat bantu teknis, tetapi juga representasi dari komitmen negara terhadap good governance, penguatan pengawasan publik, dan pencapaian efisiensi fiskal.

B. Manfaat e-budgeting dalam Tata Kelola Anggaran pada Pemerintah Kota Surakarta

Penerapan E-Budgeting di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta terus berkembang seiring dengan transformasi digital dan tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas. Berikut ini adalah manfaat yang saat ini dirasakan dari penggunaan sistem E-Budgeting:

1. Mempermudah Akses dan Kolaborasi Data Anggaran

Sistem E-Budgeting yang berbasis cloud kini memungkinkan akses lintas perangkat (PC, tablet, smartphone) dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Tidak hanya perangkat internal pemerintah, masyarakat luas juga dapat mengakses data terbuka melalui portal resmi Pemkot Surakarta. Kolaborasi antar perangkat daerah (OPD) pun menjadi lebih cepat dan efisien karena data yang sama dapat diakses secara real-time.

2. Transparansi Anggaran yang Lebih Detail dan Penguatan Akuntabilitas

Dengan fitur pelacakan anggaran berbasis waktu (real-time tracking), masyarakat dapat melihat perencanaan, penyerapan, hingga capaian kinerja anggaran. Setiap pos anggaran dideskripsikan secara jelas sehingga publik dapat memahami bagaimana dana digunakan. Hal ini memperkuat budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan karena setiap keputusan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

3. Meminimalkan Risiko Penyalahgunaan Anggaran

Fitur audit trail pada E-Budgeting modern mencatat setiap perubahan dan interaksi terhadap data anggaran, sehingga meminimalkan peluang manipulasi. Selain itu, pengawasan oleh publik melalui portal keterbukaan anggaran (open budget portal) semakin memperkecil celah korupsi, memperkuat pengawasan sosial dan peran aktif masyarakat.

4. Efisiensi Proses Administrasi dan Penyimpanan Data

Penyimpanan data digital yang terintegrasi dengan sistem administrasi keuangan daerah (SIMDA) dan aplikasi perencanaan (misalnya SIPD Kemendagri) memungkinkan pengolahan dokumen menjadi lebih cepat dan minim kertas (paperless). Proses pelaporan,

penyesuaian anggaran, hingga persiapan audit dapat dilakukan secara otomatis sehingga menghemat waktu dan sumber daya.

5. Mempercepat dan Mempermudah Evaluasi Kinerja

Dashboard interaktif dalam sistem E-Budgeting kini memudahkan kepala daerah maupun masyarakat untuk memonitor progress pelaksanaan anggaran. Evaluasi bisa dilakukan secara berkala tanpa harus menunggu laporan manual. Hal ini mendorong perbaikan yang lebih cepat dan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making)..

C. Faktor Keberhasilan e-budgeting di Pemerintahan Kota Surakarta

Keberhasilan penerapan E-Budgeting di Pemerintah Kota Surakarta dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal organisasi maupun eksternal. Salah satu faktor kunci adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kemampuan ASN dalam mengoperasikan dan memanfaatkan sistem informasi E-Budgeting sangat menentukan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. SDM yang memiliki tingkat pendidikan formal yang memadai, pengalaman kerja yang relevan, serta mengikuti pelatihan berbasis teknologi informasi, terbukti mampu meningkatkan keberhasilan implementasi E-Budgeting (Anjani & Wirawati, 2018).

Selain kualitas SDM, terdapat beberapa faktor lain yang turut mendorong keberhasilan sistem ini:

1. Dukungan Manajemen

Dukungan aktif dari pimpinan daerah dan manajemen organisasi menjadi faktor penentu utama. Komitmen pimpinan dalam mendorong penggunaan E-Budgeting, menyediakan sumber daya yang memadai, dan memfasilitasi peningkatan kompetensi ASN sangat penting dalam keberlangsungan dan pengembangan sistem.

2. Transparansi dan Akses Data

E-Budgeting menghadirkan sistem pengelolaan anggaran yang transparan, memungkinkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengakses informasi secara terbuka. Hal ini mendukung pengawasan publik terhadap alokasi dan penggunaan anggaran, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Penghargaan dan Pengakuan

Kota Surakarta secara konsisten memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan ini menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan memperkuat sistem E-Budgeting agar semakin transparan dan akuntabel.

4. Keterbukaan Informasi Publik

Penerapan E-Budgeting sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik yang diatur dalam perundang-undangan, seperti UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan sistem ini, masyarakat dapat memantau pelaksanaan anggaran secara lebih mudah dan cepat, sehingga memperkuat akuntabilitas pemerintah.

5. Faktor Organisasi

Faktor lain seperti ukuran organisasi, keseimbangan antara pendapatan dan beban kerja, serta kesiapan infrastruktur teknologi juga turut memengaruhi efektivitas penerapan E-Budgeting (Kusnadi et al., 2021). Pemerintah Kota Surakarta yang telah mengembangkan berbagai inovasi digital dalam tata kelola pemerintahan turut mendukung keberhasilan sistem ini.

D. Kelebihan dan Kekurangan e-budgeting dalam Pemerintahan Kota Surakarta

E-budgeting mempunyai beberapa kelebihan yang cukup signifikan dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Pertama, sistem ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyusunan anggaran, jika sebelumnya pengelolaan anggaran biasa dilakukan secara manual dan memakan waktu serta biaya yang besar. Melalui penerapan e-budgeting, pemerintah dapat menghemat waktu dan biaya persiapan, serta membuat pelaksanaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, e-budgeting juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, karena setiap departemen merasa pekerjaannya diperhatikan oleh semua pihak internal, yang mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi. Data yang dihasilkan dari sistem ini lebih akurat dan terintegrasi dengan sistem informasi keuangan lainnya, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan dan evaluasi. E-budgeting juga memungkinkan akses data secara online, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi anggaran kapan saja dan di mana saja, tidak hanya terbatas pada

masyarakat lokal. Namun, meskipun banyak kelebihan, sistem e-budgeting ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti kemungkinan adanya peretasan atau bahkan virus, sehingga dibutuhkan tenaga ahli IT yang lebih lagi untuk lebih menjaga keamanan sistem karena penjagaannya harus lebih diperketat. Kemudian juga masyarakat yang masih belum peka terhadap teknologi, sehingga perlu ada sosialisasi dan pengembangan kemampuan untuk penggunaan teknologi untuk masyarakat luas.

E. Tantangan Yang Dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam Pengimplementasian e-budgeting

Pada pelaksanaan sistem informasi E-Budgeting, juga tidak selalu berjalan dengan lancar tanpa adanya sebuah hambatan atau tantangan, pada hal ini pemerintah Kota Surakarta juga memiliki beberapa hambatan dalam pengimplementasian sistem E-Budgeting ini. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta:

Adanya ancaman peretasan atau hack merupakan salah satu kelemahan terbesar dari penyelenggara sistem E-Budgeting. Adanya kemungkinan situs atau web yang dapat diretas, mengingat digitalisasi dan globalisasi sehingga memudahkan seseorang dengan mudah memanipulasi sebuah situs. Untuk memperkecil kemungkinan peretasan, maka pemerintah perlu untuk memiliki seseorang yang ahli dalam bidang IT untuk dapat memantau adanya pergerakan situs yang mencurigakan. Selain itu, keamanan harus lebih diperketat lagi. Agar hacker tidak dapat melakukan hal-hal yang merugikan seperti menghapus laporan keuangan, karena hal tersebut dapat menghambat proses peraliran dana pemerintah yang sudah dialokasikan sebelumnya.

Selain adanya ancaman peretasan, ancaman virus juga tidak lepas dari sebuah sistem. Bedanya virus tersebut dapat menyebabkan kerusakan sistem yang berkepanjangan, sehingga mengancam data-data yang ada di dalamnya. Seperti menghapus data ataupun menghilangkan seluruh data laporan keuangan yang ada pada situs E-Budgeting. Virus ini dapat menyebar melalui penjelajahan, penggunaan internet, atau bahkan pengunduhan data yang sudah terinfeksi virus. Perlu adanya pengamanan dari virus-virus tersebut, seperti penggunaan antivirus yang berkualitas dan selalu memiliki data cadangan sebagai antisipasi di masa mendatang.

Bukan hanya dalam konteks sistem, namun juga pada konteks masyarakat yang masih kurang paham akan teknologi. Karena tidak semua masyarakat memiliki teknologi informasi dan paham dengan penggunaan teknologi informasi tersebut. Sehingga pemerintah harus mengadakan sosialisasi rutin yang ditujukan kepada masyarakat yang masih belum memahami teknologi agar masyarakat dapat lebih paham dalam pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Selain melalui sosialisasi, pemerintah juga dapat melakukan pelatihan sebagai tempat pengembangan kemampuan masyarakat.

F. Perbedaan Sebelum dan Sesudah Penerapan e-budgeting

Transparansi harus dikedepankan oleh otoritas publik yang bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Maka dari itu, dalam menunjukkan komitmennya sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pemerintah Kota Surakarta terus berupaya terhadap Keterbukaan Informasi Publik dengan menerapkan E-Budgeting. Perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, pemerintah dituntut untuk terus berinovasi dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung pengelolaan keuangan daerah. Sebelum penerapan E-Budgeting, perencanaan, penganggaran, dan pelaporan masih dilakukan secara manual, yang dinilai kurang efektif dan efisien. Dengan adanya E-Budgeting, masyarakat dapat langsung memantau penggunaan anggaran, sehingga kepercayaan mereka terhadap pemerintah meningkat dalam hal realisasi anggaran. Selain itu, sistem ini juga mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai aparatur negara. Sebelum diterapkannya E-Budgeting, penyusunan anggaran masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu yang lama, biaya yang besar, dan proses yang lambat, menyebabkan pelaksanaan anggaran kurang efektif dan efisien. Namun, karena sistem ini terintegrasi dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan, E-Budgeting mampu menghemat waktu dan biaya dalam proses persiapan. Penerapan sistem ini secara signifikan meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi anggaran oleh pemerintah (Julianty, 2020).

Transformasi digital dalam pengelolaan anggaran melalui e-budgeting membawa perubahan besar dibandingkan metode konvensional yang sebelumnya diterapkan. Pada masa lalu, seluruh tahapan penganggaran dilakukan secara manual, mengandalkan dokumen cetak yang rawan rusak atau hilang, serta menyulitkan proses pelacakan. Hal ini membuat seluruh prosedur menjadi lambat, birokratis, dan memakan waktu panjang untuk mendapatkan persetujuan. Kurangnya transparansi dan minimnya jejak digital juga memperbesar risiko manipulasi data serta kesalahan akibat faktor manusia. Namun, sejak diberlakukannya e-budgeting, seluruh proses dilakukan secara digital dan tanpa dokumen fisik, dimulai dari pengajuan hingga pelaporan. Sistem ini mempercepat alur kerja melalui otomatisasi, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena seluruh aktivitas tercatat secara digital, sehingga memungkinkan pelacakan dan audit secara akurat. Informasi anggaran kini dapat diakses publik, memungkinkan pengawasan yang lebih luas. Dengan sistem yang terpusat dan data yang terintegrasi, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan berbasis data. Para pemimpin daerah juga dapat melakukan pengawasan secara real-time melalui dashboard digital. Secara keseluruhan, e-budgeting telah merevolusi tata kelola anggaran pemerintah menjadi lebih modern, efisien, dan bertanggung jawab, serta mendorong optimalisasi penggunaan sumber daya publik.

Simpulan

Penerapan e-Budgeting di Pemerintah Kota Surakarta merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan efisien. Sistem ini tidak hanya memodernisasi proses penganggaran dari manual menjadi digital, tetapi juga meningkatkan akses publik terhadap informasi keuangan daerah secara real-time. Melalui fitur pelacakan anggaran, audit trail, hingga dashboard evaluasi kinerja, e-Budgeting berhasil mempercepat proses administrasi, memperkecil celah korupsi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran.

Kota Surakarta menjadi contoh keberhasilan penerapan e-Budgeting berkat dukungan sumber daya manusia yang kompeten, komitmen manajemen, kesiapan infrastruktur, dan keterbukaan informasi publik. Hal ini ditunjukkan melalui capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang konsisten dari BPK.

Meskipun demikian, sistem ini tetap menghadapi tantangan seperti ancaman keamanan siber, virus, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Secara keseluruhan, e-Budgeting terbukti mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilannya di Kota Surakarta memberikan pembelajaran penting bagi pemerintah daerah lain untuk mengadopsi sistem serupa sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan prinsip good governance dalam sektor publik.

Daftar Pustaka

- Arini, S., & Nasehati, S. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI E-BUDGETING DALAM Mendukung TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA. *MANAJEMEN*, 2(2), 134-140.
- Dan Manajemen, 4(2), 183–193.
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–102.
- Julianty, A. F. (2020). Analisis Implementasi E Budgeting Dalam Mendukung Transparansi Pada Pemerintah Kota Surakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(4).
- Meilani, F. A., Marpaung, G. S., Adinda, N., & Nasirwan. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penganggaran elektronik (E-Budgeting) pada sektor pemerintahan. *Jurnal Spektrum Ekonomi*, 7(6).
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi E Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah di Indonesia. *E Jurnal Akuntansi*, 28(1), 287–301.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Andhayani, A. (2020). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: EBudgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi*
- Perpres Nomor 95 tahun 2018. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

- Rafiqi, I., & Selviyanti, N. H. (2021). Efektivitas Implementasi e-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance dengan Model CIPP (Studi Kasus pada Kota Surabaya). *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 1(2), 115-138.
- Rahma, A. N., & Rani, U. (2023). Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 63-70.
- Rohma, F. F. (2023). Urgensi Implementasi Penganggaran Elektronik (E Budgeting) pada Sektor Pemerintahan. *JPA: Journal of Public Accounting*.